

## ORIENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL TERHADAP MINORITAS

**TARYANA**

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 7 Indramayu

Email : [t4ry4n4.p4i.b@gmail.com](mailto:t4ry4n4.p4i.b@gmail.com)

**DOI** 10.5281/zenodo.3553472

### **Abstrak**

*Bangsa Indonesia sebagai negara Bhineka Tunggal Ika yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama, strata sosial dan lain-lainnya, tentunya sangat mendambakan keserasian dalam perbedaan-perbedaan baik dalam hal agama, politik. Salah satu jalan untuk mencapai dambaan di atas adalah melaluikeragaman etnik, budaya, dan agama serta strata sosial dari masyarakat suatu bangsa, karena pendidikan multikultural merupakan respon terhadap perkembangan keragaman. Sedangkan secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh peserta didik tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti agama, gender, etnis, ras, dan budaya, serta strata sosial. Fokus demikian ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mayoritas. Multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti terhadap perbedaan (difference) atau “politics of recognition”; politik pengakuan terhadap eksistensi orang-orang dari kelompok minoritas dalam segala hal untuk mencapai persatuan dalam perbedaan.*

**Kata Kunci:** etnisitas, minoritas, diskriminasi, multikulturalisme.

*Indonesia as a nation of unity in diversity, composed of various ethnic groups, cultures, religions, social strata and others, is of course, in the hope of harmony within diversities in all terms of religion, politics, security, social class and as well as in education in order to create state social justice and welfare as a reflection of the Pancasila state basis. One way to achieve the above dream is through multicultural education, as a means of building tolerance of ethnic diversity, cultural, and religion and social strata of the nation, because multicultural education is a response to the diversity of school population growth, as the demand of equal rights for every group. While in the wider sense, multicultural education includes all students regardless of their groups of origins such as religion, gender, ethnic, racial, and cultural, and social strata. Ideally, however, the concept of multicultural*

*education, is not solely directed to the areas of race, religion, and culture. Such a focus once had been an emphasis of intercultural education that emphasizes improved understanding and tolerance of individuals who come from minority groups integrated into the community of majority. Multicultural education is actually an attitude of “caring” and willing to understand the discrepancy (difference) or the “politics of recognition”; political recognition of the existence of the people from minority groups in all cases and concerns to achieve unity in diversity.*

## PENDAHULUAN

Ke-Bhineka Tunggal Ika-an merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau terbesar di dunia, mencapai 17, 667 pulau besar dan pulau kecil. Karena itu wajar kalau dikatakan kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dielakkan, sekaligus anugerah Yang Mahakuasa. Kenyataan menunjukkan terdapat 350 kelompok etnis, adat tradisi, dan cara-cara sesuai dengan kondisi lingkungan tertentu, namun setiap warga negara Indonesia berbicara dalam satu bahasa nasional.

Ali Maksun menjelaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu horizontal dan vertikal. Dalam perspektif horizontal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, makanan dan budayanya. Sedangkan dalam sudut pandang vertikal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan, dan tingkat sosial budaya.

Mengutip Usman Pelly, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki insan Indonesia guna saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka, persamaan adalah anugerah dan perbedaan adalah berkah. Namun, di samping menjadi kebanggaan, keragaman bangsa Indonesia juga menjadi tantangan sekaligus ancaman; belum semua warganya bisa menerima gagasan tentang sebuah tatanan multikultural. Munculnya keterbukaan politik saat ini, setelah selama lebih dari tiga dekade hidup dalam otoritarianisme, justru menjadi salah satu pintu masuk bagi berlangsungnya bermacam-macam proses penguatan politik identitas di banyak tempat. Lebih dari sekedar bentuk-bentuk euforia politik setelah lepas dari otoritarianisme, kecenderungan politisasi identitas etnik dan agama yang sekarang terjadi di beberapa daerah sampai pada level ketika kebersamaan sebagai sebuah bangsa mulai dipertaruhkan. Beberapa tendensi formalisasi agama melalui kebijakan publik dalam label peraturan daerah, misalnya, mengundang resiko dilanggarnya *the lowest common denominator* yang sudah disepakati bersama sejak Indonesia meraih kemerdekaan dari kolonialisme

tahun 1945 yang lalu, yakni fundamen bahwa Indonesia bukanlah negara yang didasarkan pada satu agama tertentu.

Berbagai fenomena kegaduhan dan kekerasan (utamanya terhadap golongan minoritas) yang merebak di banyak tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi *alarm* akan adanya krisis multidimensi sebagai “bayangan depan cermin” kemajemukan yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia yang plural dan multikultur.

Guna menghadapi berbagai gejolak dan realitas kekinian bangsa Indonesia yang mengancam paradigma ke-Bhineka Tungga Ika-an, diperlukan terobosan pemikiran mengenaikonsep pendidikan yang mampu memberdayakan manusia dan masyarakat dengan perbedaan yang dimiliki. Dengan bahasa lain, konsep pendidikan tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan mendesak bangsa Indonesia saat ini untuk merekonstruksi kembali “kebudayaan nasional Indonesia” yang terdiri dari keragaman etnis dan budaya tersebut. Dalam konteks ini, konsep pendidikan multikultural bisa menjadi alternatif mengingat pendidikan multikultural melihat masyarakat secara luas dari keberbedaan yang dimiliki. Paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Pada bulan Oktober 1994 UNESCO merekomendasi ide pendidikan multikulturalisme menjadi komitmen global. Rekomendasi itu di antaranya memuat empat pesan. *Pertama*, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain. *Kedua*, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. *Ketiga*, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan.

Tulisan ini hendak menyorot, apa yang dimaksud dengan pendidikan multikulturalisme? dan apa pula yang dimaksud dengan kelompok minoritas? Serta bagaimana signifikansi dari pendidikan multikultural bagi kelompok minoritas di Indonesia?

## PEMBAHASAN

### Membedah Konsep Multikulturalisme

Secara etimologis multikulturalisme marak digunakan pada tahun 1950-an. Sedangkan kerangka konseptual tentang masyarakat multikulturalisme tidak terlalu baru di Indonesia, sebab prinsip negara Indonesia adalah sebagai negara

"Bhinneka Tunggal Ika" yang mencerminkan bahwa meskipun Indonesia adalah negara terdiri dari berbagai sukubangsa, etnis dan agama, tetapi terintegrasi dalam ikatan keikaan, kesatuan".

Multikulturalisme berasal dari akar kata *multi* (banyak), *kultur* (budaya), dan *isme* (aliran/paham). Secara hakiki dalam kata ini terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan.

Bloom sebagaimana kutip Atmadja, menjelaskan bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Artinya, meliputi sebuah penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.

Menurut Sosiolog Universitas Indonesia Parsudi Suparlan, multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan alasan multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaaan budaya, atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan masyarakat.<sup>8</sup> Multikulturalisme akan menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan kebangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat yang multikultural.

Konsep multikulturalis mengupas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, hak asasi manusia, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, tingkat serta mutu produktivitas serta berbagai konsep lainnya yang lebih relevan. Konsep ini senada dengan apa yang dikemukakan Bloom bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Artinya, meliputi sebuah penilaian terhadap kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.

## **Pendidikan Multikultural: Konsepsi, Tujuan, Strategi, Model dan Pendekatan**

## 1. Konsepsi Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural bisa didefinisikan sebagai pendidikan untuk (tentang) keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Andersen dan Cusher, dalam Choirul Mahpud, yang menjelaskan pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan.

Sedangkan James Banks menjelaskan pendidikan multi-kultural sebagai pendidikan untuk *people of colour*; maksudnya pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai suatu keniscayaan karenanya pendidikan multikultural adalah sunatullah dan anugerah Yang Maha Kuasa. Selanjutnya bagaimana agar perbedaan-perbedaan tersebut mampu disikapidengan semangat egaliter dan penuh toleransi.

Secara sederhana Muhaemin el-Ma'hady dalam Choirul Mahpud, menjelaskan pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural dari suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan multikultural adalah sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupannya tanpa membedakan ras, etnik, agama dan strata sosial.

## 2. Tujuan dan Strategi Pendidikan Multikultural

Dalam konsep pendidikan multikultural, fokus dari pendidikan multikultural tidak lagi diarahkan semata-mata pada kelompok rasial, agama, dan kultural domain atau mainstream. Fokus demikian ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap "peduli" dan mau mengerti terhadap perbedaan (*difference*) atau "(*politic of recognition*)" politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas. Lebih singkatnya, tujuan inti dari subjek pendidikan multikultural adalah untuk mencapai pemberdayaan (*empowerment*) bagi kelompok-kelompok minoritas dan *disadvantaged*.

Bagian terpenting dari pada pendidikan multikultural adalah bagaimana menumbuhkan sensitivitas peserta didik akan kebudayaan, budaya masyarakat yang bersifat plural? Deng bahasa lain, bagaimana orang-orang dapat belajar tentang berbagai macam alternatif untuk mempersepsi, berperilaku, dan mengevaluasi kelompok lainnya sehingga mereka dapat menyesuaikan kepada multikultur yang diperlukan untuk kesejahteraan bersama, tanpa melakukan pengurangan penerimaan akan etnisitasnya sendiri yang orisinal.

### 3. Model dan Pendekatan Pendidikan Multikultural

Ada beberapa model yang bisa diterapkan dalam praktek pendidikan multikultural. Secara terinci Magsino, sebagaimana kutip Tilaar dalam Sutarno, mengidentifikasi 6 (enam) jenis model pendidikan multikultural. *Pertama*, pendidikan untuk “*emergent society*”. Model ini merupakan suatu upaya rekonstruksi dari keaneka-ragaman budaya yang diarahkan kepada terbentuknya budaya nasional. *Kedua*, pendidikan untuk kelompok budaya yang berbeda. Model ini merupakan suatu pendidikan khusus pada anak dari kelompok budaya yang berbeda. Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang sama dengan mengurangi perbedaan antara sekolah dan keluarga, atau antara kebudayaan yang dikenalnya di rumah dengan kebudayaan di sekolah. Model ini bertujuan membantu anak untuk menguasai bahasa resmi serta norma dominan dalam masyarakat.

*Ketiga*, pendidikan untuk memperdalam saling pengertian budaya. Model ini bertujuan untuk memupuk sikap menerima dan apresiasi terhadap kebudayaan kelompok yang berbeda. Model ini merupakan pendekatan liberal pluralis yang melihat perbedaan budaya sebagai hal yang berharga dalam masyarakat. Di dalam kaitan ini Pendidikan Multikultural diarahkan kepada memperkuat keadilan sosial dengan menentang berbagai jenis diskriminasi dan etnosentrisme.

*Keempat*, pendidikan akomodasi kebudayaan. Tujuan model ini adalah mempertegas adanya kesamaan dari kelompok yang bermacam-macam. Mengakui adanya partikularisme dengan tetap mempertahankan kurikulum dominan. *Kelima*, pendidikan “*accomodation and reservation*” yang berusaha untuk memelihara nilai-nilai kebudayaan dan identitas kelompok yang terancam kepunahan. Terakhir, pendidikan multikultural yang bertujuan untuk adaptasi serta pendidikan untuk memelihara kompetensi bikultural. Model ini mengatasi pendekatan kelompok spesifik, identifikasi dan mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi secara *cross-cultural* dengan mendapatkan pengetahuan tentang bahasa atau kebudayaan yang lain.

Untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia perlu memakai kombinasi model yang ada, seperti yang dikemukakan Gorski, pendidikan multikultural dapat mencakup tiga jenis transformasi, yaitu: (a) transformasi diri, (b) transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, dan (c) transformasi masyarakat.

Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju, dikenal lima pendekatan: *Pertama*, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. *Kedua*, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman budaya, *ketiga*, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan, *keempat*, pendidikan dwi budaya, dan *kelima*, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia.

## Problem Kelompok Minoritas di Indonesia

Definisi mengenai kelompok minoritas sampai saat ini belum dapat diterima secara universal. Namun demikian yang lazim digunakan dalam suatu negara, kelompok minoritas adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Minoritas sebagai 'kelompok' yang dilihat dari jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari negara bersangkutan dalam posisi yang tidak dominan. Keanggotaannya memiliki karakteristik etnis, agama, maupun bahasa dan strata sosial yang berbeda dengan populasi lainnya dan menunjukkan setidaknya secara implisit sikap solidaritas yang ditujukan pada melestarikan budaya, tradisi, agama dan bahasa.

Bisa juga diartikan bahwa kelompok minoritas merupakan orang-orang yang karena asal-usul keturunannya atau ciri fisik tubuhnya dipisahkan dari orang-orang lainnya dan diperlakukan secara tidak sederajat atau tidak adil dalam masyarakat dimana mereka hidup. Karena itu mereka merasakan adanya tindakan diskriminasi.

Mengacu pada dua usulan definisi minoritas, beberapa hal akan mengganggu pikiran kita. *Pertama*, dalam kedua definisi tersebut minoritas pertama-tama ditunjukkan oleh perbandingan numeriknya dengan sisa populasi yang lebih besar. Artinya, sebuah kelompok bisa disebut minoritas kalau jumlahnya signifikan lebih kecil dari sisa populasi lainnya dalam sebuah negara.

*Kedua*, minoritas mengandaikan sebuah posisi yang tidak dominan dalam konteks sebuah negara, tapi frase "tidak dominan" tersebut tidak dijelaskan secara spesifik. Artinya pengandaian tersebut juga menuntut pengandaian lain: bahwa terma "dominan" bisa dipahami sebagai sebuah makna tunggal yang melingkupi seluruh sector kehidupan sosial. *Ketiga*, menjadi minoritas juga mengandaikan terdapatnya perbedaan salah satu atau semuanya.

## Signifikansi Pendidikan Multikultural bagi Kelompok Minoritas

Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk berpotensi memicu benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kasus Ambon, Sampit, konflik antara FPI dan kelompok Achmadiyah, dan sebagainya telah menyadarkan kita bahwa kalau hal ini terus dibiarkan maka sangat memungkinkan untuk terciptanya disintegrasi bangsa. Syafri Sairin, antropolog UGM memetakan akar-akar konflik dalam masyarakat plural adalah: (a) perebutan sumber daya, alat-alat produksidan kesempatan ekonomi (*access to economic resources and to means of production*); (b) perluasan batas-batas sosial budaya (*social and cultural borderline expansion*); dan (c) benturan-benturan kepentingan politik dan agama (*conflict of political, ideologi, and religious interest*).

Dalam kondisi ini, dipandang sangat penting memberikan porsi pendidikan multikultural sebagai wacana baru dalam sistem pendidikan di Indonesia terutama

agar peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan karena suku, ras, strata sosial, agama dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya. Hal ini dapat diimplementasikan baik pada substansi maupun model pembelajaran yang mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya.

Penambahan informasi tentang keragaman budaya merupakan model pendidikan multikultural yang mencakup revisi kurikulum atas materi pembelajaran, termasuk revisi buku-buku teks. Di Indonesia masih diperlukan usaha panjang dalam merevisi buku-buku teks agar mengakomodasi kontribusi dan partisipasi yang lebih inklusif bagi warga dari berbagai latarbelakang dalam pembentukan multikultural Indonesia. Bangsa Indonesia juga memerlukan materi pembelajaran yang bisa mengatasi “dendam sejarah” di berbagai wilayah.

Pengintegrasian nilai-nilai dan kurikulum pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional memiliki urgensi dan signifikansi besar bagi pengembangan keharmonisan dan pemeliharaan semangat Bhineka Tunggal Ika, terutama bagi upaya perlindungan bagi hak-hak kaum minoritas. Penelitian Rini Hanipah Muslimah menunjukkan, urgensi pengintegrasian nilai-nilai pendidikan multikultural dalam teks mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, supaya siswa tidak tercerabut dari akar budaya, upaya untuk membangun sikap sensitif gender, membangun sikap anti diskriminasi etnis di sekolah, membangun sikap toleransi terhadap keberagaman inklusif, dan sebagai upaya minimalisasi konflik kepentingan.

Secara elaboratif, signifikansi pendidikan multikultural bagi kelompok minoritas dapat dipaparkan sebagai berikut:

#### 1. Sebagai Sarana Alternatif Pemecahan Konflik

Pelaksanaan pemberian pendidikan multikultural di lembaga pendidikan diyakini menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmoni yang terjadi di dalam masyarakat, sebagai salah satu *side effect* dari kepluralisme masyarakatnya. Karena, *pertama*, pendidikan multikultural mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain. *Kedua*, melalui pendidikan multikultural yang menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, akan meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan.

Dengan demikian pelaksanaan pendidikan multikultural dapat dikategorikan berhasil bilamana didalam diri peserta didik terbentuk sikap hidup saling menghargai, saling toleransi, tidak bermusuhan dikarenakan perbedaan budaya, ras, etnik, agama dan strata sosial, serta tradisi.

## 2. Sebagai Upaya agar Siswa Tidak Tercerabut dari Akar Budaya

Dalam era globalisasi masuknya budaya asing yang sangat bertentangan dengan budaya masyarakat Indonesia merupakan ancaman yang sangat serius bagi peserta didik. Karena berbagai budaya saat ini berbaur dengan banyak budaya asing yang semakin mudah didapatkan melalui beragam media, seperti televisi, internet dan sebagainya sebagai dampak dari kemajuan zaman, kecanggihan teknologi mempersingkat jarak sehingga memudahkan persentuhan antar budaya.

Untuk mensikapi realitas globalisasi tersebut, perlu adanya antisipasi, sebagai solusi konkrit, antara lain dengan cara peserta didik haruslah diberi penyadaran akan pengetahuan yang beraneka ragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas mengenai pengetahuan global, termasuk salah satu diantaranya aspek kebudayaan. Dikarenakan beragamnya budaya di dalam maupun di luar negeri, maka peserta didik dan mahasiswa sangat perlu diberi materi mengenai pemahaman multibudaya atau pendidikan multikultural agar para peserta didik tidak kehilangan arah dan tidak tercerabut dari akar budayanya.

## 3. Sebagai Landasan Pengembangan Kurikulum Nasional

Kurikulum merupakan acuan utama dalam pelaksanaan pembelajaran, yang akan memberikan sejumlah materi dan isi pelajaran yang memerlukan pengembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam melaksanakan pengembangan kurikulum masa depan yang berdasarkan pendekatan multikultural dapat dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah berikut.

## PENUTUP

Dari uraian di atas, diharapkan gagasan dan konsep pendidikan multikultural dapat merekonstruksi kembali "kebudayaan nasional Indonesia" yang terdiri dari beragam etnis, suku bangsa, budaya dan agama serta strata sosial, sebagai kenyataan yang tak dapat ditolak dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan multikulturalisme diharapkan dapat mengubah "paradigma monokultural" yang penuh dengan prasangka dan diskriminatif ke paradigma multikulturalisme yang menghargai perbedaan, keragaman, toleransi dan sikap terbuka, membangun masyarakat yang berperadaban, toleransi terhadap sesama manusia, mandiri dan mampu mengatur diri sendiri, bebas dari paksaan, ancaman dan kekerasan untuk menuju dan tercipta masyarakat baru Indonesia, dimana kelompok minoritas dapat menikmati pendidikan yang mereka cita-citakan tanpa ada perbedaan sedikitpun dari kelompok mayoritas.

## DAFTAR PUSTAKA

As'ad, M. "Pluralisme Agama Dalam Pandangan Islam." *Akademika*, 2012, 1-9.  
<http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/akademika/article/>

- download/55/50.
- Azhari, Rusli. "Multikulturalisme Dalam Wacana Al-Qur'an." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 2012. <http://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/44>.
- Azzuhri, Muhandis. "Konsep Multikulturalisme Dan Pluralisme Dalam Pendidikan Agama (Upaya Menguniversalkan Pendidikan Agama Dalam Ranah Keindonesiaan)." *Forum Tarbiyah*, no. 10 (2012): 47-48.
- Baidi. "Agama Dan Multikulturalisme : Pengembangan Kerukunan Masyarakat Melalui Pendekatan Agama." *Millah: Jurnal Studi Agama* 10 (2010): 1-30.
- Mubit, Rizal. "Peran Agama Dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.163-184>.
- Rif 'atul, Mahfudhoh, Tsanawiyah Madrasah, Keras Negeri, and Indonesia Jombang. "Multikulturalisme Pesantren Di Antara Pendidikan Tradisional Dan Modern." *Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2015): 1978-306.
- Rosyada, Dede. "Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional." *Sosio Didaktika* 1, no. 1 (2014): 1-12.
- Setyaningum, Arie. "Multikulturalisme Sebagai Identitas Kolektif Kebijakan Politik Dan Realitas Sosial." *Jurnal ISP* 7, no. UGM (2003): 243-60.
- Sudrajat, Sudrajat. "Revitalisasi Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 82-90. <https://doi.org/10.21831/JPPFA.V2I1.2620>.
- Susanto, Edi. "Multikulturalisme Pendidikan Agama Islam (Telaah Atas Pemikiran Nurcholish Madjid)." *Tadrîs* 2, no. 2 (2007).
- Unwanullah, Arif. "Transformasi Pendidikan Untuk Mengatasi Konflik Masyarakat Dalam Perspektif Multikultural." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 1, no. 1 (2012): 45-57.
- Weli Arjuna Wiwaha. "Pengembangan Pendidikan Islam Multikultural." *El-Hikam Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember* 8, no. Volume VIII Nomor 2 Juli-Desember 2015 (2015): 211-32.
- Winataputra, Udin Saripudin. "Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Lka Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, no. Vol 14, No 75 (2008) (2008): 1009-27. <http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/364>.
- Zuriah, Nurul. "Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal Dalam Fenomena Sosial Pasca Reformasi Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Pendidikan Penelitian* 12, no. 2 (2011): 63-72.